

# PEMBUATAN INDIKATOR KINERJA BAGI ORGANISASI PUBLIK

Dr. Wahyudi Kumorotomo  
Magister Administrasi Publik  
Universitas Gadjah Mada

[www.kumoro.staff.ugm.ac.id](http://www.kumoro.staff.ugm.ac.id)

[kumoro@ugm.ac.id](mailto:kumoro@ugm.ac.id)

Telp: [081 328 488 444](tel:081328488444)

# Masalah Umum dalam organisasi publik: visi tidak menunjukkan prinsip SMART

SMART: Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-Bound

Contoh: “Bantul Projotamansari, Sejahtera, Demokratis, Agamis”  
Produktif  
Ijo Royo-royo  
Tertib  
Aman  
Sehat  
Asri  
Sejahtera  
Demokratis  
Agamis.

Visi lebih sering mengarah ke “semboyan”.

Misi: Sering tidak SMART, tidak bisa mengarahkan ke kinerja satuan organisasi secara jelas

▶ Contoh di Bantul:

1. Mempercepat pemulihan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi melalui pengembangan ekonomi lokal berwawasan lingkungan
2. Mewujudkan kesejahteraan lahir-batin dengan prioritas meningkatkan kecerdasan dan kesehatan masyarakat, produktivitas sumberdaya daerah
3. Mewujudkan penyenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, demokratisasi, HAM dan supremasi hukum.

# Sasaran Pembangunan Daerah (#1)

1. Kemiskinan turun, kesempatan kerja meningkat
2. Infrastruktur semakin baik (listrik 90% RT, jembatan Kali Putih, Sewon, 20 m; Kembangsari, Piyungan, 30 m)
3. Kesenjangan berkurang (Indeks Gini turun, 0,2474 th 2007 → 0,1973 th 2010)
4. Kualitas hidup masy meningkat (HDI menjadi 76)
5. Lingkungan hidup (rehab 2.000 Ha lahan kritis)
6. Kapasitas pemerintah daerah (SDM meningkat 10%, keuangan daerah 10%)
7. Partisipasi masyarakat dan swasta (Pemilu 83%; investasi swasta naik 10%).

# Sasaran Pembangunan Daerah (#2)

8. Pelayanan masy semakin baik (penyelewengan turun 10%; SPM tercapai 80%)
9. Keadilan dan penegakan hukum (kriminalitas & Pekat turun 5%, konsistensi Perda 100%)
10. Kesetaraan gender (peningkatan peran perempuan, KDRT turun 5%)
11. Kecukupan pangan (gabah kering pungut 64,76 kw/ha; bawang merah 11,49 ton/ha)
12. Dunia usaha dan koperasi (TDI 350 unit usaha, PMA/PMDN: 15 usaha & 350 usaha non-fasilitas)
13. Pariwisata (peningkatan kunjungan 10%)
14. Tata-ruang dan permukiman (mitigasi bencana 80%, penataan kawasan kumuh 50%).

# Kaitan antar Dokumen Rencana

No	Permasalahan Dasar	Strategi	Rencana Tindak									Instansi	
			Ivestasi	Waktu			Non Investasi	Waktu					
				I	II	III		I	II	III			
I	KESEHATAN												
1	Pengadaan sarana air bersih khususnya di daerah terpencil di wilayah pegunungan dan pesisir yang banyak penduduknya masih sangat kurang	Optimalisasi pengelolaan bendungan/waduk, menjadi sumber air bersih  Identifikasi sumber air yang bisa dikelola sebagai sumber air bersih	1	Pembangunan sarana penampungan air bersih (PAH dan PAB) di sentra pemukiman masyarakat miskin									Dinas PUD dan Kantor PDAM
			2	Pembangunan proyek perpipaan ke lokasi pemukiman penduduk miskin									
			3	Penyediaan hydran umum									
			4	Penambahan sarana mobil tangki									
	Kondisi pemukiman yang buruk karena tidak memiliki MCK, Spal, serta rumah yang tidak layak huni sehingga masyarakat miskin rentan terhadap penyakit	Menciptakan permukiman keluarga miskin yang sehat	1	Rehabilitasi dan penataan rumah layak huni				1	Studi pemetaan wilayah miskin yang sangat membutuhkan MCK Umum				Din Kes - PDAM
								2	Koordinasi dengan PDAM untuk menempatkan tempat penampungan air bersih				
								3	Studi desain penataan SPAL di lingkungan miskin				

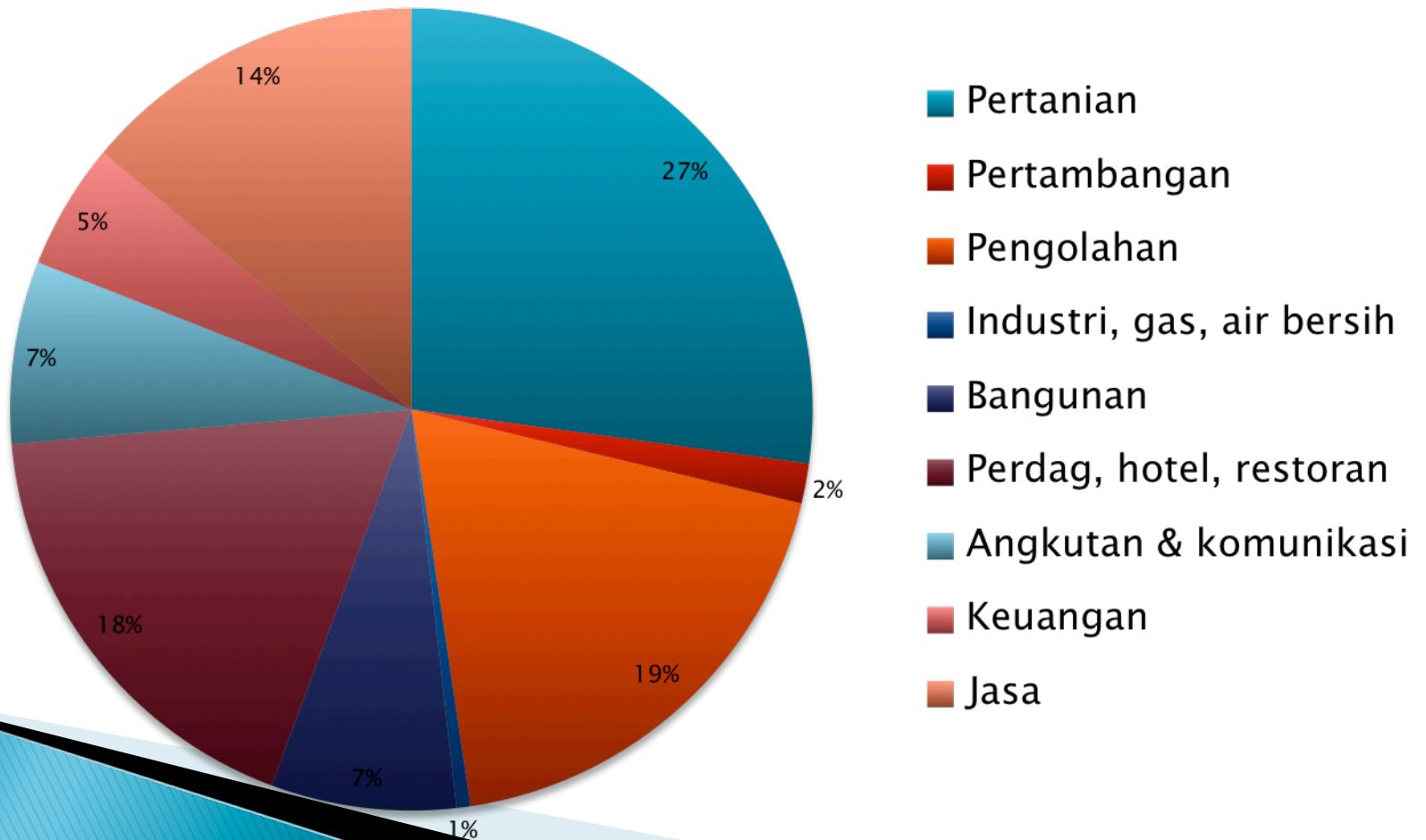
RPSPD

RPJMD

RKPD

RENJA SKPD

# Indikator Kinerja Umum: PDRB



# Kondisi Ekonomi Makro Daerah

Th	Kemiskinan (%)	Pengangguran (%)	Pertumbuhan ekonomi (%)	PDRB (Rp. M)	Investasi (Rp. M)	PAD (Rp. M)
2006	35,05	8,95	2,02	3.299	638	38,4
2007	28,11	8,54	4,88	3.481	749	42,8
2008	26,04	8,15	5,35	3.646	842	45,5
2009	24,11	7,78	5,47	3.845	934	49,4
2010*	21,90	7,42	5,58	4.060	1.026	52,9

\* Prediksi RPJMD



# Pagu Indikatif RKPD 2010

No.	SKPD	Pagu Indikatif	Pos Bantuan	Total
1	Pendidikan dasar	30.424.543.000	6.040.000.000	36.464.543.000
2	Pend Men.Non-formal	13.323.653.000		13.323.653.000
3	Kepend. & Capil	1.442.895.500		1.442.895.500
4	Perindagkop	2.541.556.500	544.185.000	3.085.741.500
5	Nakertrans	1.667.516.100	885.622.000	2.553.138.100
6	Kesehatan	17.307.214.125	3.185.400.000	20.492.614.125
7	Kelautan & PP	536.696.000		536.696.000
8	Perhubungan	1.143.890.820		1.143.890.820
9	Pertanian & Kehut.	6.318.300.000		6.318.300.000
10	Pekerjaan Umum	96.935.830.000		96.935.830.000
11	Sumberdaya air	12.668.504.200		12.668.504.200
12	Kebud & Par	2.890.008.050	500.000.000	3.390.008.050
13	Sosial	1.236.271.605	12.734.450.000	13.970.721.605
14	Perijinan	804.937.500		804.937.500
15	PKAD	79.337.034.525	2.520.000.000	81.857.034.525

# Pertimbangan untuk Rencana, Anggaran dan Kinerja

1. Keterkaitan antara dokumen rencana dan anggaran sudah sesuai?
2. Prioritas anggaran sudah mencerminkan kebutuhan rakyat di daerah?
3. Alokasi dana APBD sudah mencerminkan akuntabilitas anggaran?
4. Peran aparat pemerintah sudah optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
5. Peran anggota DPRD sebagai wakil rakyat sudah mewarnai RPJMD, RKP, APBD dan prioritas pendanaan pembangunan?

# Indikator Kinerja Yang Baik

1. **Langsung:** mengukur sedekat mungkin hasil yg akan dicapai
2. **Objektif:** tidak ambigu, hanya punya satu dimensi, tepat secara operasional
3. **Cukup (adequate):** mampu mengukur hasil
4. **Kuantitatif (jika memungkinkan),** untuk indikator kualitatif deskripsinya harus jelas
5. **Rinci:** berlaku dalam kelompok pelaksana dan kegiatan secara khusus
6. **Praktis:** data dapat diperoleh pada saat yg tepat dengan biaya wajar
7. **Dapat diandalkan (reliable):** kualitas data dapat diyakini.

# Indikator Baku Bidang Pendidikan

Indikator Kinerja	Satuan
Angka partisipasi sekolah menurut usia sekolah	%
Tingkat melek huruf / buta huruf	%
APK (Angka Partisipasi Kasar)	%
APM (Angka Partisipasi Murni)	%

# Indikator Baku Bidang Ketenagakerjaan

Indikator Kinerja	Satuan
Tingkat pertumbuhan angkatan kerja	%
Proporsi penduduk yg bekerja menurut lapangan usaha	%
Tingkat pengangguran (bukan angkatan kerja)	%
Distribusi kegiatan utama penduduk	%
Distribusi lapangan usaha penduduk	%
Penduduk usia kerja	%

# Contoh IK Bidang Lingkungan

No	Indikator Kinerja	Unit
1	Berkurangnya pencemaran udara Perbandingan kualitas udara berdasar: SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> , CO, O <sub>2</sub> , PM <sub>10</sub>	%
2	Pengurangan pencemaran air: pH, BOD, COD, DO, TSS	%
3	Pengurangan pencemaran limbah padat: volume limbah padat	%
4	Berkurangnya pencemaran B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun): tingkat buangan limbah industri, buangan limbah pertambangan	%
5	Berkurangnya kerusakan hutan: angka hot-spot, angka kebakaran hutan, bertambahnya lahan kritis	%
6	Kerusakan terumbu-karang & mangrove: sebaran terumbu-karang, tingkat kesehatan terumbu-karang, rasio tebang pilih.	Ha %

# Kesimpulan Umum

1. Kebanyakan indikator kinerja belum dapat dijadikan ukuran capaian kinerja individual maupun organisasi → berorientasi pada terlaksananya program/kegiatan, bukan pada hasil atau manfaat program.
2. Sebagian satuan sudah menetapkan IK sampai *outcome*, *benefit* atau *impact*, tetapi banyak yg tidak terkait langsung dengan kegiatan.
3. Dokumen laporan dalam organisasi publik (LAKIP, LPPD, Laporan Monev) belum mencerminkan kinerja satuan yang khusus.
4. Penggunaan data statistik dalam organisasi pemerintah masih belum optimal. Analisis kuantitatif cenderung dihindari oleh aparat karena berbagai alasan.

**TERIMA KASIH**

